

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI**



TAHUN 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022, merupakan suatu bentuk evaluasi yang dilakukan pertanggungjawaban Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatannya dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan. LKIP ini suatu penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan terukur dalam rangka penyelenggaraan “good governance”. Pada dasarnya, bahwa kinerja Dinas merupakan suatu *action plan* dalam rangka merealisasikan dan mendukung pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi yaitu **“Cimahi Baru, Agamis, Maju dan Berbudaya”**.

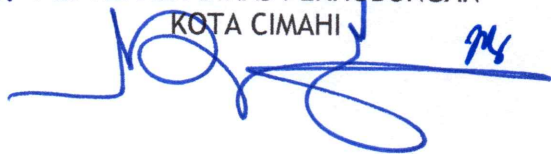
Pada anggaran perubahan tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan APBD Perubahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. **33.565.820.444,-** terdiri dari 2 (dua) program yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota serta terdiri dari 16 (enam belas) kegiatan dan 46 (empat puluh enam) sub kegiatan. Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan yang mengenai pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun, Capaian Kinerja tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja selama 1 (satu) tahun sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi selama 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (Renja Tahunan) Tahun 2022 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB	B	B
	2 Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	Persentase	100	92,82	92,82%
	3 Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persentase	100%	91,78%	91,78%
	4 Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persentase	67%	61,25%	91,42%
	5 Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persentase	95%	83,23	87,61%
	6 Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persentase	78,09%	78,09%	100%
	7 Persentase penurunan titik kemacetan	Persentase	30%	26,67%	88,9%

Dari 1 (satu) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022, pencapaian kinerja pada 1 (satu) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja memperoleh realisasi capaian kinerja sebesar 88,50%.

Cimahi, Januari 2023
 x. Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KOTA CIMAH



BUDI RAHARJA, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19690209 198609 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban tersebut tertuang dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam organisasi pemerintahan, Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selanjutnya secara implementatif untuk mengatur hal dimaksud diterbitkan regulasi berupa Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2017 - 2022, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 menjadi laporan keberhasilan/ kegagalan penyelenggaraan organisasi dan telah disusun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kota Cimahi.

Tujuan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintahan (LKIP) Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dalam laporan LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan.

C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Cimahi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan Kota Cimahi sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi yang menangani di Bidang Perhubungan, juga telah dilengkapi dengan Peraturan Daerah (PERDA) yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kota Cimahi dan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 207 Tahun 2016) didalamnya mengatur KEWENANGAN Pemerintahan Kota Cimahi dalam penyelenggaraan LLAJ, yaitu :

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RIJLLAJ-K)

2. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan, APILL, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan LLAJ.
3. Pengoperasian dan pengelolaan terminal penumpang tipe C.
4. Penetapan titik lokasi parkir dan penyelenggaraan perparkiran.
5. Penyelenggaraan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor wajib uji di Kota Cimahi.
6. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota
7. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN) di jalan kota atau kajian teknis lalu lintas.
8. Penetapan dan penyelenggaraan manajemen kebutuhan lalu lintas.
9. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas di jalan kota.
10. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya didalam wilayah kota.

11. Pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan penumpang dalam trayek (angkutan kota) dan izin angkutan penumpang tidak dalam trayek (taksi, angkutan dengan tujuan tertentu/sewa, angkutan dengan tujuan parawisata, atau pelayanan angkutan dalam trayek di kawasan tertentu pada jalan local dan jalan lingkungan dan angkutan khusus, antar jemput anak sekolah/angkutan karyawan) yang wilayah pelayannya di dalam kota.
12. Penentuan tarif penumpang angkutan kota.
13. Pembentukan, penetapan dan memfasilitasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Pemeriksaan, pengawasan dan penegakan hukum di terminal dan di jalan sesuai kewenangannya dan berpedoman pada kewenangan dan peraturan perundang-undangan.
15. Membangun dan mewujudkan budaya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Berkaitan dengan penanganan masalah transportasi yang merupakan salah satu program prioritas Wali Kota yaitu penanganan masalah kemacetan maka Dinas Perhubungan Kota Cimahi pada anggaran tahun 2022 di dukung anggaran yang bersumber pada anggaran APBD Kota Cimahi sebesar Rp. **33.565.820.444,-** di dukung oleh 2 (dua) progam yaitu :

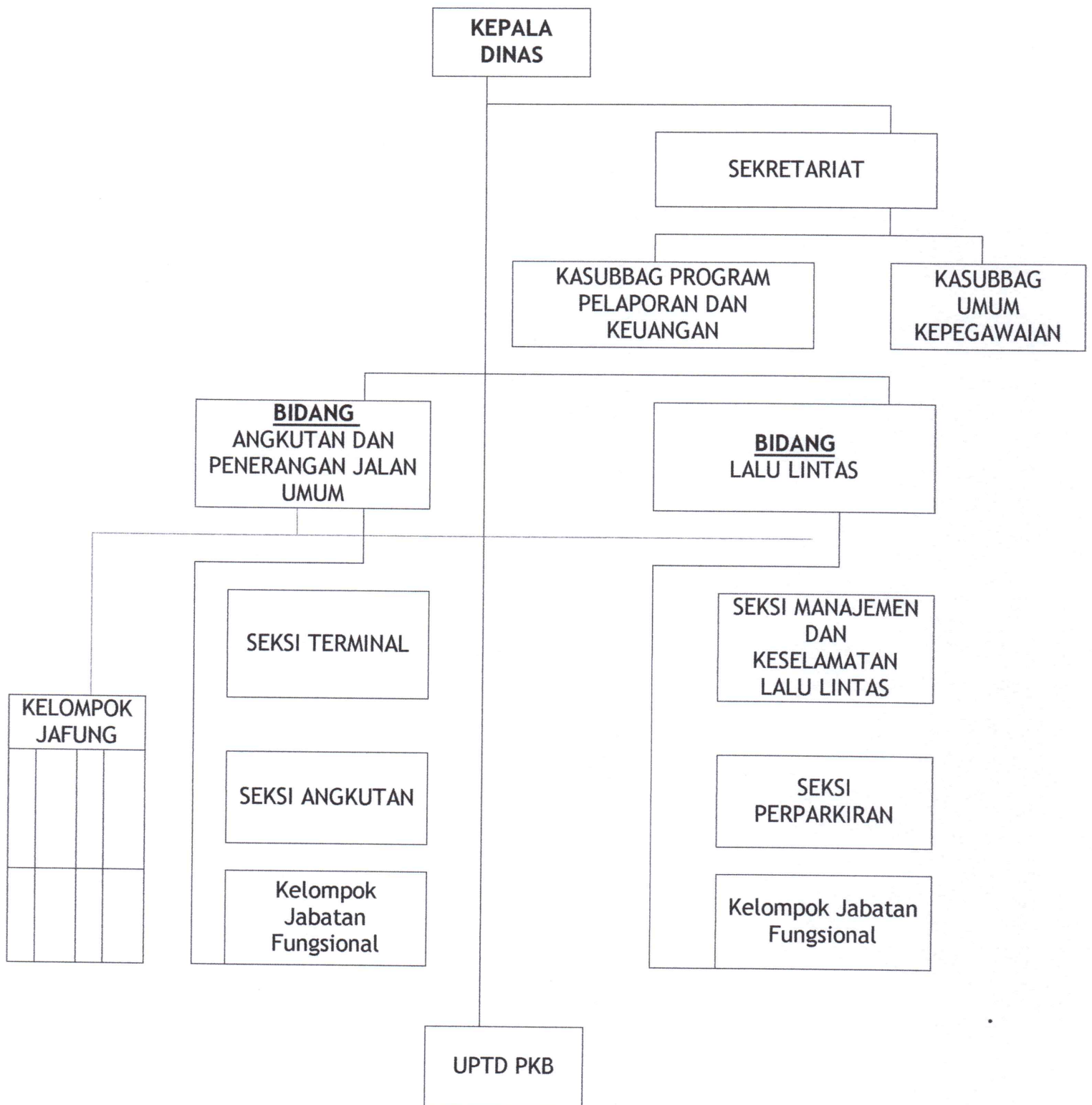
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.

D. Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi dan Fungsi

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada perangkat daerah Kota Cimahi. Bahwa struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi (Tipe C) sebagaimana pada gambar dibawah ini :

Gambar I.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cimahi



2. Rincian tugas pokok dan fungsi

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok melaksanakan, merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang perhubungan.

2. Sekretariat Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program Pelaporan dan Keuangan;

3. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan dibidang lalu lintas.

Bidang Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Manajemen Keselamatan Jalan
- b. Seksi Perparkiran.
- c. Pejabat Analis Kebijakan Muda

4. Bidang Angkutan

Bidang Angkutan mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan perhubungan di bidang angkutan.

Bidang Angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan
- b. Seksi Terminal
- c. Pejabat Analis Kebijakan Muda

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Permasalahan Utama

Dalam mencapai target kinerja, permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
UPT PKB					
Sumber Daya Manusia Pengujian	Masih berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum mencapai target	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub no 156 tahun 2016 tentang kompetensi penguji berkala kendaraan bermotor	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
Sarana Prasarana	Keadaan alat penunjang kerja belum optimal	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub NO 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor	dianggarkan di Tahun Anggaran 2022	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
	Gedung Pelayanan kurang memadai	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub NO 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor	Anggaran pendukung belum optimal	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal
Bidang Lalu Lintas					
Sarana Prasarana Lalu Lintas	Kuantitas : kurang Kualitas: perlu peningkatan	UU Nomor 22 Tahun 2009 Permenhub Nomor 11 Tahun 2019	Keterbatasan Anggaran	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Belum optimalnya kinerja jaringan jalan
SDM	Kuantitas : kurang Kualitas : perlu peningkatan	Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor 11 Tahun 2019	Keterbatasan Anggaran	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Terhambatnya layanan bidang lalu lintas
Regulasi	Belum terakomodirnya SOP Lalu lintas angkutan jalan	Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 jo Permenhub Nomor 11 Tahun 2019 dan Perda Nomor 2 Tahun 2009	Belum adanya usulan Rancangan Peraturan Walikota	Terkait koordinasi dengan Bagian Hukum	Belum optimalnya kinerja jaringan jalan
Bidang Angkutan					
Sarpras. Perijinan Angkutan	Sistem IT masih bersifat local	UU Nomor 22 Tahun 2009	Pembangunan system terintegrasi data	Diskominfo menyiapkan Server	Informasi layanan konsumen masih kurang up to date

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Terminal					
Sumber Daya Manusia	Masih berjalan sesuai dengan SOP tetapi belum tercapai sesuai target	UU Nomor 22 Tahun 2009	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Pelayanan belum optimal
Sarana prasarana	Keadaan alat penunjang kerja belum optimal	UU Nomor 22 Tahun 2009	Anggaran pendukung belum optimal	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan belum optimal
	Gedung Pelayanan belum selesai pembangunan	UU Nomor 22 Tahun 2009	Anggaran pendukung belum optimal	Bangun Guna Serah	Terbatasnya pengalokasian anggaran
PJU					
	Belum Optimalnya Penerangan Jalan Umum	UU Nomor 23 Tahun 2014	Anggaran pendukung belum optimal	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan belum optimal
	Kurang memadainya Gudang untuk penyimpanan barang pemeliharaan	UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 ayat 1.0	Anggaran pendukung belum optimal	Terkait persetujuan Anggaran dari TAPD	Pelayanan belum optimal
Sumber Daya Manusia	Belum optimalnya Pengawasan penerangan jalan umum	3 SHI 7391 ; 2008 SDM PermenpanRB Nomor 25 tahun 2016 lampiran nomor 20	Penempatan pegawai sesuai kompetensi	Terkait penambahan SDM tidak mempunyai kewenangan	Masih adanya pengaduan masyarakat mengenai PJU
Modal share	Faktor muat masih kecil	UU Nomor 22 Tahun 2009	Sudah adanya studi angkutan umum massal	Kordinasi dengan Pemerintah Pusat	Kurang populernya angkutan umum dan maraknya angkutan berbasis online
Sekretariat					
Proses Pencairan Keuangan	Pengumpulan SPJ sering terlambat	Permenpan 53 tahun 2014	Melakukan evaluasi SDM (BPP)	Melaksana kan evaluasi internal Melakukan konsultasi dan kordinasi dengan BKD	Kinerja belum optimal

Sistematika Penyajian

Substansi yang tercakup dalam LAKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Menguraikan tentang penerapan sistem akuntabilitas kinerja, pencapaian kinerja sasaran, kendala dan hambatan, anggaran serta strategi pemecahan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika penyajian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran, kebijakan dan program. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang menggambarkan tentang sasaran dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan serta program dan kegiatan yang harus dilaksanakan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini menggambarkan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang mendukung pencapaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan keberhasilan dan kegagalan, kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja serta langkah antisipatif dan strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

Dalam lampiran menampilkan Pengukuran Kinerja Tahun 2022 dan lampiran lain yang diperlukan.

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis (RENSTRA)

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022 merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Dinas Perhubungan Kota Cimahi disusun dari hasil penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMDP) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Dengan rincian sasaran dan indikator sebagai berikut :

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN SASARAN		INDIKATOR KINERJA
	Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	Nilai evaluasi SAKIP
		Persentase Realisasi Anggaran
		Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara
		Persentase ASN yang di bina
		Persentase fasilitas lalu lintas yang layak
		Persentase Angkutan yang Layak jalan
		Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum
		Persentase penurunan titik kemacetan

Perjanjian Kinerja

Perumusan Target Kinerja merupakan langkah awal dalam tahapan perencanaan kinerja. Target kinerja selaras dengan arah dan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Dokumen Perjanjian Kinerja disusun oleh setiap pimpinan instansi pemerintah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supevisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan

Kota Cimahi Tahun 2022 sebagai berikut :

PENETAPAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1	Nilai evaluasi SAKIP		Nilai/Indeks	BB
	2	Persentase Realisasi Anggaran		Persentase	100
	3	Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara		Persentase	100%
	4	Persentase ASN yang di bina		Persentase	100%
	5	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak		Persentase	67%
	6	Persentase Angkutan yang Layak jalan		Persentase	95%
	7	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum		Persentase	78,09%
	8	Persentase penurunan titik kemacetan		Persentase	30%

PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.021.966.889,-	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	12.543.853.555,-	Mendukung/Berkaitan sasaran ke 1
JUMLAH		33.565.820.444,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis dan 8 (delapan) indikator kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi mengacu kepada Rencana Strategis 2017-2022. Rata-rata capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan prosentase target capaian kinerja sebagai berikut:

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1 Nilai evaluasi SAKIP	Nilai/Indeks	BB	B	B
	2 Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100	91,78	99,19%
	3 Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara	Persentase	100%	78,38%	100%
	4 Persentase ASN yang di bina	Persentase	100%	85,03%	100%
	5 Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persentase	67%	83,27	97,96%
	6 Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persentase	95%	101,38%	101,38%
	7 Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persentase	78,09%	61,22%	78,40%
	8 Persentase penurunan titik kemacetan	Persentase	30%	20%	70%

Secara keseluruhan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 secara umum telah memenuhi harapan dengan tercapainya 8 indikator dari 8 indikator.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu :

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2022

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1	Nilai evaluasi SAKIP		BB	Nilai/Indeks	B
	2	Persentase Realisasi Anggaran		100	Persentase	91,78
	3	Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara		100	Persentase	78,38%
	4	Persentase ASN yang di bina		100	Persentase	85,03%
	5	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak		85	Persentase	83,27
	6	Persentase Angkutan yang Layak jalan		85	Persentase	101,38%
	7	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum		100	Persentase	61,22%
	8	Persentase penurunan titik kemacetan		30	Persentase	20%

Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja 2022

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1 Nilai evaluasi SAKIP	BB	Nilai/Indeks	B
	2 Persentase Realisasi Anggaran	100	Persentase	91,78
	3 Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara	85	Persentase	78,38%
	4 Persentase ASN yang di bina	100	Persentase	85,03%
	5 Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	85	Persentase	83,27
	6 Persentase Angkutan yang Layak jalan	85	Persentase	101,38%
	7 Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	78,09	Persentase	61,22%
	8 Persentase penurunan titik kemacetan	30	Persentase	20%

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar di bidang perhubungan sesuai dengan SPM Perhubungan yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. Dibawah ini indikator yang terkait dengan Dinas Perhubungan Cimahi sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Standar Pelayanan Minimal	Nilai	Indikator Kinerja Dinas Perhubungan	Target	Realisasi
1	Angkutan Jalan	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi Kabupaten/Kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 5.200 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum	85%	83,24%
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	Jumlah terminal terpelihara secara layak	4	3
		Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	Persentase panjang jalan di Kota Cimahi terlayani PJU	85%	83,27%

Dari data tabel di atas bisa diketahui bahwa Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi yang memiliki hubungan keterkaitan dengan indikator standar pelayanan minimal adalah sebanyak 3 (tiga) indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan.

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kota Cimahi telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Cimahi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMDP Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang berbunyi: “Cimahi Baru, Agamis dan Berbudaya” yang mengacu kepada Misi Ke 4 Kota Cimahi yaitu “Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan” yang dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022
Meningkatnya Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1	Nilai evaluasi SAKIP		BB	Nilai/Indeks	B
	2	Persentase Realisasi Anggaran		100	Persentase	91,78
	3	Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara		85	Persentase	78,38%
	4	Persentase ASN yang di bina		100	Persentase	85,03%
	5	Persentase fasilitas lalu lintas yang layak		85	Persentase	83,27
	6	Persentase Angkutan yang Layak jalan		85	Persentase	101,38%
	7	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum		78,09	Persentase	61,22%
	8	Persentase penurunan titik kemacetan		30	Persentase	20%

Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan 5 (lima) indikator yang terdiri atas :

1. Nilai evaluasi SAKIP dengan target Nilai BB terealisasi dengan nilai B berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target nilai Sakip yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan diantaranya :

- a. Revisi RPJMD 2017-2022 dibawah kordinasi Bappeda;
 - b. Revisi renstra dan IKU menyesuaikan dengan hasil revisi RPJMD berkordinasi dengan Bappeda dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dimulai dari eselon 2, 3 dan 4;
 - d. Penggunaan ESAKIP dengan menginput data yang terkait dengan perencanaan dan laporan kinerja secara berkala;
 - e. Penyusunan dokumen LKIP dengan melaksanakan review melibatkan semua bidang dan UPT;
2. Persentase Realisasi Anggaran dengan target 100% berdasarkan realisasi anggaran kegiatan tahun 2022.

Permasalahan yang dihadapi :

- a. penanganan pengaduan pengguna layanan masih dinyatakan kurang
- b. sarana prasarana perlu terus untuk diperbaharui.

upaya dan faktor pendorong :

- a. penanganan pengaduan terus di optimalkan melalui ditetapkannya staf yang khusus menjadi admin pengaduan pelayanan.
3. Adanya anggaran yang selalu dialokasikan untuk perbaikan sarana dan prasarana pelayanan setiap tahunnya. Permasalahan yang dihadapi oleh Pelayanan PJU adalah :
1. Masih ada gap yang cukup besar antara kebutuhan pemasangan PJU PJL dan PJG di seluruh wilayah Cimahi dengan jumlah yang sudah terpasang;
 2. Kurangnya sarana mobilitas untuk pemeliharaan PJU, PJL dan PJG.

Upaya dan faktor pendorong tercapainya kinerja Pelayanan PJU :

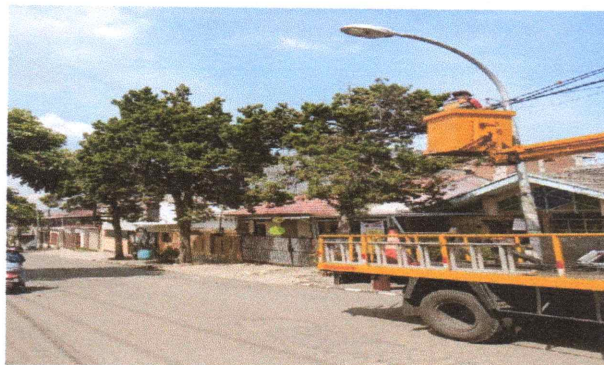
1. Bappeda memberikan perhatian terkait dengan pemenuhan kebutuhan PJU, PJL dan PJG. Selain itu pelimpahan kewenangan dan anggaran ke kelurahan yang bisa mengakomodir pengadaan PJU, PJL dan PJG membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat akan PJU, PJL dan PJG.

2. Dinas Perhubungan mengusulkan untuk melaksanakan kajian terkait dengan pembentukan UPT PJU sehingga jangkauan layanan ke masyarakat bisa lebih optimal.
3. Adanya Pengadaan fasilitas sarana prasarana PJU yang lebih memadai guna mendukung pemberian pelayanan PJU, PJL dan PJG yang lebih optimal kepada masyarakat.

**REKAPITULASI PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN
TERPASANG PER TAHUN 2018 SAMPAI DENGAN TAHUN 2022**

No	Uraian	Target Titik PJU yang Terpasang					Target Titik PJU yang Terpasang					KET
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah PJU	193	76	0	0	8	193	76	0	0	8	
2	Jumlah PJL	120	364	0	125	76	120	364	0	56	77	
3	Jumlah PJG	2.220	1.371	0	725	553	2.220	1.371	0	863	553	
	Total	2.533	1.811	0	850	637	2.533	1.811	0	919	638	

Kegiatan Pemeliharaan yang dilaksanakan UPT PJU



4. Persentase kelayakan pengoperasian kendaraan umum dengan Target 95% terealisasi 101,38% berdasarkan data dari UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2022 yakni dari jumlah 3.776 kendaraan umum yang uji KIR jumlah kendaraan tidak lulus uji KIR 25 kendaraan.

Dibawah ini tabel data jumlah kendaraan yang diuji berdasarkan jenis kendaraan Tahun 2022 sebagai berikut :

No	URAIAN	JENIS KENDARAAN TAHUN 2022						JUMLAH
		Mobil Penumpang	Mobil Bus	Mobil Barang	Kereta Tempelan	Kereta Gandengan	Kendaraan Khusus	
1	KEND YANG DIUJI	701	213	6.446	42	0	150	7.552
2	KEND YANG LULUS UJI	701	213	6.446	42	0	150	7.552
3	KEND YANG TIDAK LULUS UJI	25	2	64	1	0	5	97

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDORONG
Kondisi alat uji KIR sudah tua dan beberapa ada yang rusak sehingga tidak bisa optimal dalam memberikan pelayanan	Pengadaan/pergantian alat uji baru

Dokumentasi kegiatan pengujian kendaraan di UPT PKB



- Jumlah terminal terpelihara secara layak dengan target 3 lokasi dan tercapai 3 lokasi yakni Terminal Cimindi, Pasar Atas dan terminal Pasar Antri.

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi dengan 3 (tiga) indikator yang terdiri atas :

- Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)

Berdasarkan rata-rata hasil traffic counting 15 Ruas Jalan Kota Cimahi untuk total 2 (dua) arah didapatkan LOS = 0,46 dengan

type pelayanan C (Arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan). Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, pengukuran Kinerja didasarkan pada tingkat pelayanan yang dipengaruhi oleh fungsi jalan dan dimana jalan tersebut berada. Tipe pelayanan pencapaian kinerja, dihitung dengan rumus bahwa semakin kecil volume lalu lintas per kapasitas jalan maka realisasi menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan semakin baik. Perhitungan traffic counting 15 ruas jalan berada pada Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan dengan kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan.

**Tingkat Pelayanan Jalan/Level Of Service (LOS)
15 Ruas Jalan di Kota Cimahi untuk total 2 arah**

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jl. Daeng M Ardiwinata	2/2 UD	1.953	32,44	1047,61	37,88	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
2.	Jl. Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	2/2 UD	2.245	33,92	1218,92	50,94	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
3.	Jl. Jati serut	2/2 UD	2.445	32,02	1304,59	57,16	0,53	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Jl. Gandawijaya	4/2 UD	1.337	27,68	721,95	42,03	0,54	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT
5.	Jl. Lurah	4/2 UD	1.170	26,90	547,76	34	0,47	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
6.	Jl. Sisingamangaraja	2/2 UD	2.045	37,75	600,76	24,47	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
7.	Jl. Kebon Kopi	2/2 UD	1.285	31,97	868,77	38,10	0,68	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
8.	Jl. Ranca bentang	2/2 UD	1.020	30,65	370,39	21,03	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
9.	Jl. Kerkof	2/2 UD	2.220	32,40	1127,27	51,03	0,51	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari JUM'AT

No	Nama Jalan	Tipe Jalan	Kapasitas (Smp/jam)	Kecepatan (Km/jam)	Volume (Smp/jam)	Kepadatan	V/C (Smp/jam)	Tingkat Pelayanan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	JL. Sadarmanah	2/2 UD	1.285	33,95	653,93	29,20	0,51	C	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
11.	JL. Cibogo	2/2 UD	1.020	30,30	292,26	16,21	0,29	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari MINGGU
12.	JL. Sudirman	4/2 UD	1.305	36,29	981	36,24	0,75	D	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari KAMIS
13.	JL. Warung contong	2/2 UD	1.355	34,24	487,39	27,56	0,36	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
14.	JL. Usman Dhomiri	2/2 UD	1.243	36,75	322,68	15,61	0,26	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
15.	JL. Cipageran	2/2 UD	2.045	35,03	560,51	24,78	0,27	B	Dilaksanakan selama 5 hari (Senin, Kamis, Jumat Sabtu dan Minggu). Arus Lalu Lintas terbesar pada hari SABTU
JUMLAH							6,9		

Permasalahan yang dihadapi :

1. Tata Guna Lahan Kota Cimahi yang terbilang cukup padat, perlu melebarkan badan jalan dengan ukuran yang standar 3.5 meter untuk masing - masing lajur.
2. Adanya angkutan umum yang sering ngetem di badan jalan. Hal ini tentu akan mengakibatkan kemacetan.
3. Volume kendaraan meningkat drastis, akan tetapi tidak diikuti dengan penambahan ruas jalan.
4. Tata kelola perparkiran yang belum optimal sehingga pelayanan parkir sering mengganggu kinerja ruas jalan.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

1. Penertiban lokasi titik parkir :



Penertiban Titik Parkir ;



2. Pengawasan dan penertiban titik lokasi kemacetan :



Pengawasan dan Penertiban arus lalu lintas ;



3. Pengawasan dan penertiban titik lokasi kemacetan :

- ✚ Pengawasan dan Penertiban arus lalu lintas pada hari sabtu dan minggu;



4. Pengawasan dan penertiban angkutan umum :

- ✚ Pengawasan dan Penertiban angkutan umum Cimahi ;



5. Pengawasan dan penertiban pada terminal penumpang :

- ✚ Pengawasan dan Penertiban terminal tipe C ;



6. Pengawasan dan penertiban lalu lintas gabungan dengan TNI/POLRI:

- ✚ Pengawasan dan Penertiban Lalu lintas bagi pengendara ;



7. Rehabilitasi/pemeliharaan Perlengkapan jalan:

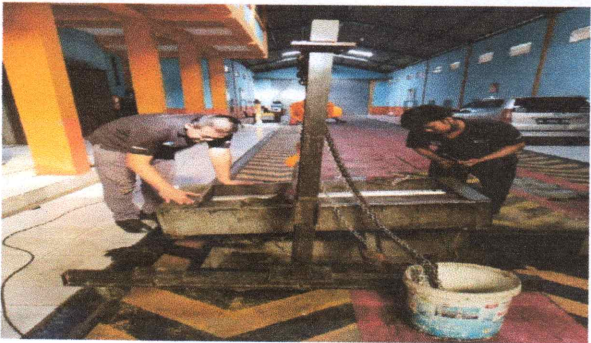
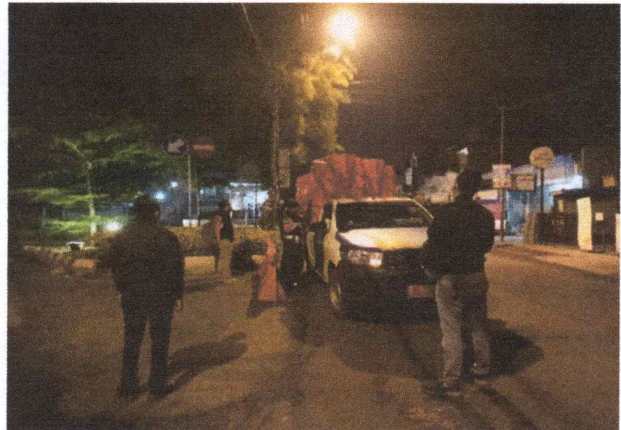
- ✚ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum ;



- ✚ Pemeliharaan Papan Tarif Parkir ;



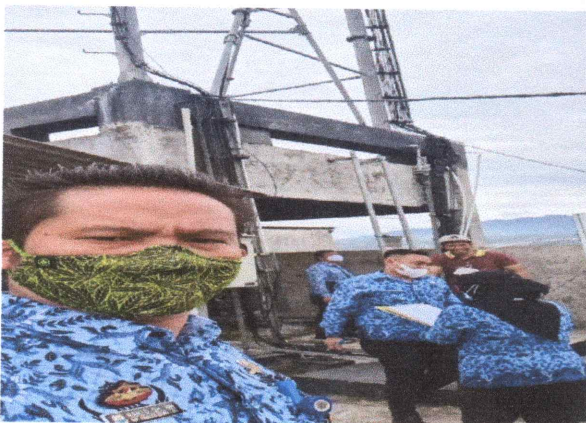
✚ Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan ;



✚ Pemeliharaan/rehabilitasi alat uji kendaraan bermotor ;

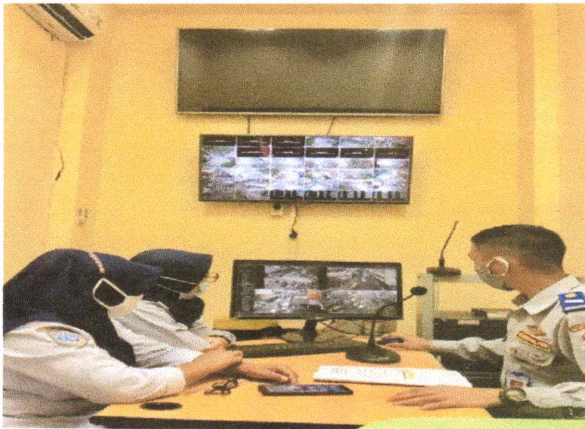
8. Pendampingan kegiatan Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi :

✚ Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi;

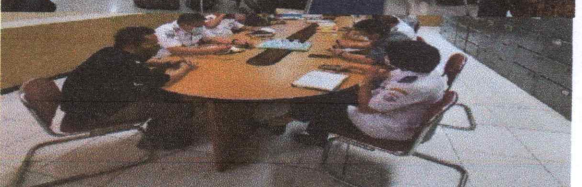


9. Pemantauan dan pengawasan lalu lintas :

📺 Pemantauan CCTV;



Koordinasi dan Sosialisasi internal maupun eksternal yang dilakukan :



A. Capaian Indikator, Program dan Anggaran

Berdasarkan analisis atas efisiensi pengguna sumberdaya pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi diketahui bahwa terdapat 8 (delapan) indikator kinerja yang mencapai targetnya dan realisasi anggaran cukup efisien dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN ANGGARAN (%)
1. Meningkatkan Tingkat Keselamatan Dan Kenyamanan Transportasi	1 Nilai evaluasi SAKIP	Nilai/Indeks	BB	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.021.966.889,-	19.652.718.951,-	93,5
	2 Persentase Realisasi Anggaran	Persentase	100	91,78				
	3 Persentase Sarana dan Prasarana yang di Pelihara	Persentase	100%	78,38%				
	4 Persentase ASN yang di bina	Persentase	100%	85,03%				
	5 Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	Persentase	67%	83,27	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	12.543.853.555,-	11.155.480.215,-	89,26
	6 Persentase Angkutan yang Layak jalan	Persentase	95%	101,38%				
	7 Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	Persentase	78,09%	61,22%				
	8 Persentase penurunan titik kemacetan	Persentase	30%	20%				

B. Realisasi dan Capaian Anggaran

Adapun realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2022

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
1	KPA : Ir. TETI MEGAWATI, MAB												
	PPTK : DEWI IRAWATI GULTOM,S.T., M.M.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	222.740.400,00	100,00	222.740.400,00	100,00	99,98	198.415.900,00	89,08	89,08		
		1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.775.300,00	100,00	15.775.300,00	100,00	100,00	14.955.000,00	94,80	94,80		
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.192.500,00	100,00	35.192.500,00	100,00	100,00	30.604.500,00	86,96	86,96		
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	117.616.000,00	100,00	117.616.000,00	100,00	100,00	101.867.800,00	86,61	86,61		
		4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.156.600,00	100,00	54.156.600,00	100,00	99,93	50.988.600,00	94,15	94,15	Belanja Materi Rp. 40.000,- tidak terrealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tetapi 99,93%	
	PPTK : DHARMA JAYA, SE., MAP												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.465.994.992,00	100,00	10.465.994.992,00	100,00	100,00	10.028.210.501,00	95,82	95,82		
		5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	238.529.000,00	100,00	238.529.000,00	100,00	100,00	202.812.000,00	85,03	85,03		
		6	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.632.000,00	100,00	10.632.000,00	100,00	100,00	10.250.000,00	96,41	96,41		
		7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.001.300,00	100,00	60.001.300,00	100,00	100,00	59.960.200,00	99,93	99,93		
		8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95.550.200,00	100,00	95.550.200,00	100,00	100,00	94.411.600,00	98,81	98,81		
		9	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	285.451.500,00	100,00	285.451.500,00	100,00	100,00	224.790.340,00	78,75	78,75		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
1	KPA : Ir. TETI MEGAWATI, MAB PPTK : DHARMA JAYA, SE., MAP												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.465.994.992,00	100,00	10.465.994.992,00	100,00	100,00	10.028.210.501,00	95,82	95,82		
		10	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	24.000.000,00	100,00	24.000.000,00	100,00	100,00	20.185.000,00	84,10	84,10		
		11	Facilitasi Kunjungan Tarnu	6.000.000,00	100,00	6.000.000,00	100,00	100,00	5.800.000,00	96,67	96,67		
		12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	174.996.000,00	100,00	174.996.000,00	100,00	100,00	174.598.736,00	99,77	99,77		
		13	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	204.992.000,00	100,00	204.992.000,00	100,00	100,00	179.276.000,00	87,46	87,46		
		14	Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.309.000,00	100,00	117.309.000,00	100,00	99,81	115.106.000,00	98,12	98,12	Belanja Perabot Kantor (Asbak) Rp. 228.000,- tidak terrealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tetapi 99,81%	
		15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	8.170.791.992,00	100,00	8.170.791.992,00	100,00	100,00	8.073.973.793,00	98,82	98,82		
		16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	223.460.000,00	100,00	223.460.000,00	100,00	100,00	204.791.957,00	91,65	91,65		
		17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	815.282.000,00	100,00	815.282.000,00	100,00	100,00	631.317.375,00	77,44	77,44		
		18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.000.000,00	100,00	39.000.000,00	100,00	100,00	30.937.500,00	79,33	79,33		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
2	KPA : HENDRA GUNAWAN, S.Sos.,M.I.P. PPTK : DEWI IRAWATI GULTOM,S.T., M.M.												
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	10.333.231.497,00	100,00	10.333.231.497,00	100,00	100,00	9.426.092.550,00	91,22	91,22		
		19	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.333.231.497,00	100,00	10.333.231.497,00	100,00	100,00	9.426.092.550,00	91,22	91,22		
3	KPA : Dra. RINI LUSY WINDHARTI PPTK : LITAWATY GINTING, S.Sos.,M.A.P.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	647.537.300,00	100,00	647.537.300,00	100,00	100,00	629.532.352,00	97,22	97,22		
		20	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	23.165.350,00	100,00	23.165.350,00	100,00	100,00	22.954.600,00	99,09	99,09		
		21	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	552.545.550,00	100,00	552.545.550,00	100,00	100,00	535.769.852,00	96,96	96,96		
		22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	71.826.400,00	100,00	71.826.400,00	100,00	100,00	70.807.900,00	98,58	98,58		
	PPTK : DEDED WAHRIDA, S.T., M.Si.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	6.365.854.200,00	100,00	6.365.854.200,00	100,00	100,00	5.551.523.986,00	87,21	87,21		
		23	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	3.138.300.300,00	100,00	3.138.300.300,00	100,00	100,00	3.068.405.929,00	97,77	97,77		
		24	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	3.227.553.900,00	100,00	3.227.553.900,00	100,00	100,00	2.483.118.057,00	76,93	76,93		
	PPTK : CHAERUDDIN DJOEHARIE,S.A.P.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	538.329.200,00	100,00	538.329.200,00	100,00	99,99	513.807.120,00	95,44	95,44		
		25	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	252.387.400,00	100,00	252.387.400,00	100,00	100,00	243.427.220,00	96,45	96,45		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
3	KPA : Dra. RINI LUSY WINDHARTI												
	PPTK : CHAERUDDIN DJOEHARIE,S.A.P.												
		26	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	538.329.200,00	100,00	538.329.200,00	100,00	99,99	513.807.120,00	95,44	95,44		
				20.576.600,00	100,00	20.576.600,00	100,00	99,90	19.524.700,00	94,89	94,89	Belanja Kertasdan Cover Rp. 20.000 tidak terrealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tapi 99,90%	
		27	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa AngkutanOrang dan/atau Barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.492.200,00	100,00	2.492.200,00	100,00	100,00	2.410.550,00	96,72	96,72		
		28	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	164.857.100,00	100,00	164.857.100,00	100,00	100,00	154.149.900,00	93,51	93,51		
		29	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) DaerahKabupaten/Kota	98.015.900,00	100,00	98.015.900,00	100,00	99,94	94.294.750,00	96,20	96,20	Belanja Kertasdan Cover Rp.62.000,- tidak terrealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tapi 99,94%	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		

4	KPA : MUHAMMAD NUR EFENDI,AP., M.Si PPTK : UUS SAEPU DIN, SE												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.504.170.900,00	100,00	2.504.170.900,00	100,00	100,00	2.360.384.164,00	94,26	94,26		
		30	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	454.981.000,00	100,00	454.981.000,00	100,00	100,00	411.992.600,00	90,55	90,55		
		31	Penyediaan Perlengkapan Jalan di JalanKabupaten/Kota	1.161.565.000,00	100,00	1.161.565.000,00	100,00	100,00	1.118.309.878,00	96,28	96,28		
		32	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	887.624.900,00	100,00	887.624.900,00	100,00	100,00	830.081.686,00	93,52	93,52		
	PPTK : CUHAEDI SUPRIADI, S.E.,M.M.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	299.270.000,00	100,00	299.270.000,00	100,00	100,00	289.144.832,00	96,62	96,62		
		33	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten//Kota	299.270.000,00	100,00	299.270.000,00	100,00	100,00	289.144.832,00	96,62	96,62		
	PPTK : ALFI FAUZIAH, S.IP., M.M.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	615.104.500,00	100,00	615.104.500,00	100,00	69,70	393.747.503,00	64,01	64,01		
		34	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu LintasUntuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	549.427.900,00	100,00	549.427.900,00	100,00	67,97	341.483.203,00	62,15	62,15	Kajian analisis kebutuhan perlengkapan jalan tidak terealisasi karena gagal lelang 2x	
		35	Forum lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten / Kota	32.729.200,00	100,00	32.729.200,00	100,00	100,00	30.475.700,00	93,11	93,11		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
4	KPA : MUHAMMAD NUR EFFENDI,AP., M.SI												
	PPTK : ALFI FAUZIAH, S.IP., M.M.												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	615.104.500,00	100,00	615.104.500,00	100,00	69,70	393.747.503,00	64,01	64,01		
		36	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalin	32.947.400,00	100,00	32.947.400,00	100,00	68,45	21.788.600,00	66,13	66,13	Dianggarkan untuk 11 kegiatan tetapi yang mengajukan permohonan untuk pembuatan rekam andalin ada 6	
5	KPA : YA`COP SEBAYANG, SAP												
	PPTK : MUHAMMAD THOTHOH GOZALI MASDUKI, ST., M.SI												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.573.587.455,00	100,00	1.573.587.455,00	100,00	94,56	1.417.340.258,00	90,07	90,07		
		37	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	26.450.000,00	100,00	26.450.000,00	100,00	100,00	26.433.000,00	99,94	99,94		
		38	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	107.665.085,00	100,00	107.665.085,00	100,00	25,70	27.665.085,00	25,70	25,70	Material di kemeterianya kosong (belum tersedia) dan ada regulasi baru bahwa bukti lulus uji yang terbaru ada fungsi RFID sehingga harus ada alat tambahannya (software dan hardware)	
		39	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	19.116.000,00	100,00	19.116.000,00	100,00	100,00	15.958.500,00	83,48	83,48		

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
5	KPA : YA`COP SEBAYANG, SAP												
	PPTK : MUHAMMAD THOTHOH GOZALI MASDUKI, ST., M.Si												
			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.573.587.455,00	100,00	1.573.587.455,00	100,00	94,56	1.417.340.258,00	90,07	90,07		
		40	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	5.000.000,00	100,00	5.000.000,00	100,00	100,00	4.359.750,00	87,20	87,20		
		41	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.377.033.870,00	100,00	1.377.033.870,00	100,00	99,67	1.310.843.423,00	95,19	95,19	Belanja Souvenir/ Cenderamata Rp.4.498.000,- tidak terealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tapi 99,67%	
		42	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26.400.000,00	100,00	26.400.000,00	100,00	97,73	21.460.000,00	81,29	81,29	Belanja Jasa Penyelenggaraan Rp. 600.000,- tidak terealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tapi 97,73%	

NO	NAMA KPA / PPTK	NO	PROGRAM / SUB KEGIATAN	JUMLAH PAGU ANGGARAN (Rp.)	RENCANA			REALISASI				KENDALA / HAMBATAN	SOLUSI
					FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN				
						Rp.	%		Rp.	% terhadap Rencana	% terhadap Pagu Anggaran		
15	KPA : YA`COP SEBAYANG, SAP												
	PPTK : MUHAMMAD THOTHOH GOZALI MASDUKI, ST., M.Si												
		43	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan UnitPelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	1,573,587,455,00 11,922,500,00	100,00 100,00	1,573,587,455,00 11,922,500,00	100,00 100,00	94,56 95,76	1,417,340,258,00 10,620,500,00	90,07 89,08	90,07 89,08	Belanja Kertas dan Cover Rp. 280.000,- dan Belanja Jasa Penyelenggara Acara Rp. 225.000,- tidak terealisasi sehingga realisasi keuangan 0 dan realisasi fisik pun 0. Oleh sebab itu realisasi fisik tidak 100% tapi 95,76%	
Total/Rata-rata				33.565.820.444,00	100,00	33.565.820.444,00	100,00	99,19	30.808.199.166,00	91,78	91,78		

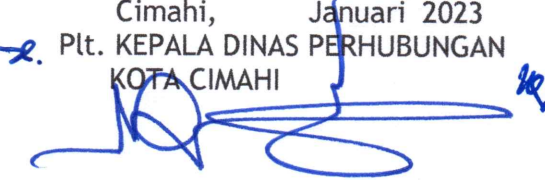
BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP yang disusun Dinas Perhubungan Kota Cimahi merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik pada Tahun Anggaran 2022. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan dan program yang dijalankan dalam Tahun 2022 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang ditetapkan. Adapun pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cimahi Tahun 2022 dari indikator yang telah ditetapkan yaitu :

Tingkat kemacetan di ruas jalan Kota Cimahi mengalami penurunan selain disebabkan oleh Dishub Kota Cimahi melakukan pengaturan dan pengawasan dalam mengurai kemacetan dengan menempatkan petugas pada titik dimaksud baik hari kerja ataupun pada hari libur (sabtu dan minggu) juga adanya undperpass di jalan dustira-sriwijaya yang telah diresmikan pada tahun 2022.

Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ini diharapkan dapat memberi informasi secara transparan sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja akuntabel bagi Dinas Perhubungan pada periode mendatang.

Cimahi, Januari 2023
2. Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIMAHI



BUDI RAHARJA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670209 198609 1 001